

Pengembangan Usaha Peternakan Berbasis Kawasan Dalam Rangka Mendukung Implementasi SDGs

Mukson¹, Edy Prasetyo², Siwi Gayatri³, Suryani Nurfadillah⁴ dan Agus Setiadi⁵

Program Studi Agribisnis Universitas Diponegoro, Semarang

¹mukson.fapetundip@gmail.com

²edyprsty@yahoo.com

³gayatri.siw@gmail.com

⁴suryani.nurfadillah@gmail.com

⁵agus_setiadi2006@yahoo.co.id

Abstrak — Pembangunan subsektor peternakan terus dituntut peran sertanya dalam perekonomian nasional maupun regional, melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumber devisa melalui ekspor, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran penting ini sejalan dengan arah pembangunann dan pencapaian 17 sasaran tujuan SDGs. Basis pengembangan peternakan dapat mengacu pada potensi kawasan, dengan memperhatikan berbagai sumberdaya yang ada seperti SDM, lahan, teknologi dan lingkungan. Pengelolaan sumberdaya yang optimal diharapkan mampu mendukung implementasi tujuan SDGs di masa pandemi Covid-19. Pengembangan kawasan peternakan diharapkan berpotensi sangat besar terhadap pencapaian SDGs utama pada point 1,2,3,8,9, 10,16, dan 17.

Kata kunci — kawasan peternakan, pengembangan, SDGs

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sub sektor peternakan terus dituntut peran sertanya dalam perekonomian nasional maupun regional, melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumber devisa melalui ekspor, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran penting dan strategis ini sejalan dengan program revitalisasi pertanian yang menempatkan kembali arti penting pertanian (peternakan) secara proporsional antara lain untuk mendukung kecukupan, ketersediaan dan ketahanan pangan asal ternak (daging, telur, dan susu). Selama kurun waktu 5 tahun (2014 – 2018) di Jawa Tengah perkembangan PDRB sektor peternakan tumbuh positif rata 8,11 % (berdasar harga berlaku) dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 1,32%. Di samping itu dalam sektor pertanian sumbangan sub sektor peternakan masih sangat besar, yaitu menempati urutan ke dua setelah tanaman pangan.

Tujuan utama pembangunan peternakan adalah peningkatan penyediaan Produk Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) dan kesejahteraan peternak melalui kebijakan dan

program pembangunan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan pemantapan sumber daya lokal. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal ternak yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan pentingnya gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, sesuai dengan potensi genetik dan potensi lainnya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang ada, di samping dapat menjadi salah satu tumpuan dalam percepatan pembangunan wilayah.

Pembangunan peternakan sebagai industri biologis mencakup empat komponen, yaitu : 1) peternak sebagai subjek harus ditingkatkan skill dan kesejahteraannya, 2) ternak sebagai objek harus ditingkatkan populasi dan produktivitasnya, 3) lahan dan lingkungan harus dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dan 4) ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat harus dikembangkan. Berdasarkan data dari [1], menunjukkan bahwa produksi daging, telur dan susu terus meningkat berturut-turut sebesar 7,68%, 3,31% dan 0,10%. Peningkatan ini sangat penting artinya dalam rangka memenuhi

kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat, terutama dalam perwujudan tujuan SDGs. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Peternakan sebagai lokomotif pembangunan pertanian adalah suatu keniscayaan apabila sebanyak 4.204.213 Rumah Tangga Peternak/RTP (Sensus Pertanian 2013) yang menguasai lebih dari 98,0% ternak di Indonesia tersebut diorganisasi dan dikonsolidasikan dengan baik. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan di sub sektor peternakan khususnya ternak sapi, diantaranya dengan memperbesar alokasi anggaran untuk peternakan sapi, di mana sejak 2017 alokasi APBN difokuskan kepada Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Sesungguhnya dalam roadmap pembangunan peternakan di Indonesia telah tertuang sasaran utama pengembangan ternak sapi tahun 2045, yaitu berupaya secara terus menerus dan sungguh-sungguh untuk terwujudnya Indonesia sebagai lumbung pangan Asia.

Kebutuhan pangan asal ternak terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, kesadaran akan pangan bergizi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kondisi permintaan (*demand*) yang terus meningkat menuntut adanya langkah-langkah strategis agar penyediaan pangan hasil ternak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, maka perlu terus mendorong berbagai sumberdaya (modal, manusia, teknologi dan sumberdaya wilayah/lahan) agar terus mampu memberikan perannya guna peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak. Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia, mempunyai potensi besar untuk pengembangan sektor peternakan. Pendekatan perwilayahan merupakan salah satu strategi pengembangan peternakan dengan memperhatikan potensi yang ada di masing-masing wilayah.

II. PERAN DAN ARTI PENTING PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN

Jawa Tengah memiliki basis dan keunggulan wilayah yang potensial untuk pengembangan peternakan (sapi potong, kambing, domba, dan

ungags). [3] mengatakan bahwa suatu wilayah dapat dibedakan menjadi sektor basis (basic sector), dan sektor non basis (non basic sector). Wilayah basis sektor dapat berfungsi untuk keperluan pertukaran (to exchange) dan dapat dianalisis dengan melihat perbandingan relatif kegiatan usaha suatu wilayah dengan wilayah lain yang lebih luas. Menurut [4] dalam mengembangkan kawasan maka perlu diperhatikan potensi dan kesesuaian agroekosistem dan efisiensi penggunaan sumberdaya. Keberadaan wilayah potensial (sektor basis) diharapkan akan mampu mensuplai kebutuhan ternak, sehingga perlu dianalisis potensinya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan peternakan. Menurut [2] pengertian Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengertian lain adalah merupakan gabungan dari sentra-sentra peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumberdaya alam, kondisi social budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang. Pengembangan kawasan peternakan dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan, pengembangan dan penyediaan bahan baku industri, serta penyediaan bahan pangan sumber hewani melalui peningkatan produksi peternakan secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat didalamnya secara berkeadilan. Pengembangan kawasan peternakan dalam operasionalnya harus disesuaikan dengan potensi agroekosistem, infrastruktur, kelembagaan, sosial ekonomi mandiri dan ketentuan tata ruang wilayah. Terkait dengan pengembangan kawasan berbasis sektor peternakan dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Lokasi sesuai dengan agroekosistem dan alokasi tata ruang wilayah.
2. Dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat dalam kawasan itu sendiri dan sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi.
3. Berbasis komoditas ternak unggulan dan atau komoditas ternak strategis.
4. Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha

5. Memiliki peluang pengembangan diversifikasi produk yang tinggi.
6. Didukung oleh kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.

Beberapa komponen yang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan pengembangan kawasan peternakan antara lain: ketersediaan lahan, pakan, penyediaan air, infrastruktur jalan, peternak dan ternak serta prasarana penunjang seperti industri pakan, obat/vaksin, alat dan mesin pertanian, Pos Keswan, Pos IB, Rumah Potong Hewan (RPH), Industri pengolah susu, daging, pasar hewan dan lain sebagainya yang dapat menunjang produktivitas ternak.

III. POTENSI KAWASAN PETERNAKAN UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN KAITANNYA DENGAN SDGS (CONTOH KASUS DI KABUPATEN PATI)

Keberhasilan pembangunan pertanian dapat terwujud salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang dijamin dalam UUD 1945 dan merupakan salah satu komponen dasar mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedaulatan pangan harus diwujudkan dalam rangka mencapai keberhasilan indikator dari kebijakan sektor pertanian. Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan system pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local [7]. Konsumsi pangan berasal dari tanaman pangan dan protein hewani. Kedaulatan pangan nasional memiliki hubungan erat dengan tingkat harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan tujuan dalam SDGs, yaitu point 1. (Tanpa Kemiskinan), Point 2 : (Tanpa Kelaparan), point 3 : (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), point 8 : (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), point 9 : (inovasi, investasi dan infrastruktur), point 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Point 12 : (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab), Point 16 : (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dan point 17 : (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Keberhasilan pembangunan kawasan peternakan secara langsung maupun tidak langsung sangat mendukung terealisasinya misi SDGs.

Potensi pengembangan peternakan dapat dianalisis dengan menggunakan parameter nilai Location Quotient (LQ). Berdasarkan hasil perhitungan analisis LQ terhadap populasi sapi potong, kambing dan itik di Kabupaten Pati pada tahun 2016-2018, diperoleh hasil nilai $LQ > 1$. [5] mengatakan bahwa suatu komoditas dapat dikatakan basis apabila memiliki nilai atau skor perhitungan Location quotient (LQ) lebih dari satu ($LQ > 1$). Hasil perhitungan nilai LQ komoditas sapi potong, kambing dan itik dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Nilai LQ Ternak Sapi Potong, Kambing dan Itik di Kabupaten Pati

Tahun	LQ			Ket.
	Sapi	Kambing	Itik	
2016	1,82	1,42	1,54	Basis
2017	1,80	1,43	1,37	Basis
2018	1,77	1,46	1,39	Basis

Keterangan : $LQ > 1$ (sektor basis), $LQ = 1$ (seimbang) dan $LQ < 1$ (nonbasis)

A. Analisis Potensi Ternak Sapi Potong

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa nilai LQ yang diperoleh komoditas sapi potong pada tahun 2016-2018 memiliki nilai LQ berturut-turut, yaitu 1,82; 1,80 dan 1,75. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai LQ komoditas sapi potong lebih dari satu ($LQ > 1$), sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas sapi potong di Kabupaten Pati merupakan komoditas basis. Skor LQ yang lebih dari satu mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan populasi komoditas sapi potong di Kabupaten Pati relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan populasi komoditas sapi potong di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas sapi potong mempunyai potensi untuk dikembangkan. Seiring dengan tingginya nilai LQ, mengindikasikan bahwa populasi sapi potong di Kabupaten Pati dapat memenuhi kebutuhan internal di Kabupaten Pati dan dapat pula memenuhi kebutuhan dari luar Kabupaten, oleh karena itu dapat membawa peningkatan aliran pendapatan bagi masyarakat untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Pati. Menurut [6] suatu komoditas basis dapat meningkatkan arus penghasilan suatu daerah karena mampu memenuhi kebutuhan baik di dalam wilayah atau di luar wilayah.

B. Analisis Potensi Ternak Kambing

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa nilai LQ komoditas kambing pada tahun 2016-2018 memiliki nilai LQ secara berturut-turut, yaitu 1,42; 1,43; dan 1,46. Nilai LQ komoditas

kambing lebih dari satu ($LQ > 1$), sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas ternak kambing merupakan komoditas basis. Komoditas dapat dikatakan basis apabila memiliki nilai atau skor perhitungan Location quotient (LQ) lebih dari satu ($LQ > 1$) [5]. Skor LQ yang lebih dari satu mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan populasi komoditas kambing di Kabupaten Pati secara relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan komoditas kambing di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas kambing layak untuk dikembangkan. Menurut [6] suatu komoditas basis dapat meningkatkan arus penghasilan suatu daerah karena mampu memenuhi kebutuhan baik di dalam wilayah atau di luar wilayah.

C. Analisis Potensi Ternak Itik

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa nilai LQ komoditas itik pada Kabupaten Pati pada tahun 2016-2018 memiliki nilai LQ secara berturut-turut, yaitu 1,54; 1,37; dan 1,39. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa skor LQ komoditas itik lebih dari satu ($LQ > 1$), sehingga komoditas itik merupakan komoditas basis. Suatu komoditas dapat dikatakan komoditas basis apabila memiliki nilai atau skor perhitungan Location quotient (LQ) lebih dari satu ($LQ > 1$) [5]. Skor LQ yang lebih dari satu mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan populasi komoditas itik di Kabupaten Pati secara relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan populasi komoditas itik di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa ternak itik layak untuk dikembangkan.

IV. PENUTUP

Pengembangan kawasan peternakan dengan memperhatikan potensi wilayah dan sumberdaya yang ada (SDM, alam, teknologi dan lingkungan) perlu didorong dan ditingkatkan agar produksi dan produktivitas ternak dapat berkembang secara maksimal, dan pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah guna mendukung tercapai SDGs. Pengembangan kawasan peternakan diharapkan berpotensi sangat besar terhadap pencapaian tujuan SDGs utamanya pada point 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 dari 17 tujuan SDGs.

REFERENSI

- [1] Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah. 2019. *Buku Statistik Peternakan Provinsi Jawa Tengah*. Tarubudaya, Ungaran.
- [2] Direktorat Pengembangan Peternakan. 2003. *Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Peternakan*. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian, Jakarta.
- [3] Hendarto, R.M. 2002. *Analisis Potensi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- [4] Kurnianto, E. 2006. *Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Perbibitan Ternak di Indonesia*. Seminar Nasional Prospek Pengembangan Perbibitan Ternak Menuju Swasembada Pangan Hewani Asal Ternak. Fakultas Peternakan UNDIP Semarang, Tanggal 11 Oktober 2006.
- [5] Oksatriandi, B. dan E.B Santono. 2014. *Identifikasi Komoditas Unggulan di kawasan Agropolitan Kabupaten Pasaman*. J. Teknik Pomits 3 (1): 8-11.
- [6] Usman. 2015. *Analisis Sektor Basis Dan Subsektor Basis Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Keerom Provinsi Papua*. JSEP 8 (3): 38-49.
- [7] UU Pangan No. 18 Tahun 2012